

**PENGARUH PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM,
PDRB DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2022**



Disusun oleh :

Tiara Novita Dewi

PROGRAM STUDI S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**PENGARUH PENGANGGURAN, UPAH MINIMUM, PDRB, DAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang Stata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Tiara Novita Dewi

Nomor Mahasiswa : 20313230

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini meyakini bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya akan sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan berlaku.

Yogyakarta 19 Januari 2024

Penulis,



Tiara Novita Dewi

PENGESAHAN

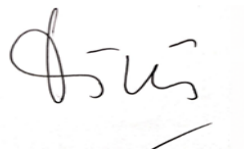
**Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2022**

Nama : Tiara Novita Dewi
Nomor Mahasiswa : 20313230
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Diana Wijayanti S.E.,M.Si

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar

Sarjana jenjang Stata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Nama : Tiara Novita Dewi
Nomor Mahasiswa : 20313230
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta,

Disahkan Oleh,

Pembimbing Skripsi : Diana Wijanti S.E.,M.Si

Penguji :

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E.,M.,Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur atas Kehaditas Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan Rahmat karunia -Nya dan Kemudahan serta kelancaraan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Skripsi Penelitian ini saya persembahkan untuk :

1. Teruntuk Alm Bapak, saya persembahkan hasil ini untuk beliau disana. Hasil skripsi ini merupakan keinginan yang beliau inginkan dari putri kecilnya dulu.
2. teruntuk diri saya sendiri karena sudah kuat dan selalu bertahan hingga bisa menyelesaikan penulisan ini.
3. Teruntuk Ibu, Orang tua dan Keluarga saya yang telah memberikan doa serta support selama penyusunan penelitian ini.
4. Teruntuk Khoirunnisa' yang telah membantu, memberikan semangat dan selalu memberikan dukungan pada peneliti selama melakukan penulisan ini, dan telah menemani saya dalam suka maupun duka selama masa kuliah di Universitas Islam Indonesia
5. Teruntuk Dwi Syafrillia yang telah membantu, memberikan semangat dan selalu memberikan dukungan pada peneliti selama melakukan penulisan ini.
6. Terima Kasih kepada Kontrakan Maju Jaya, yang telah menjadi tempat saya dalam penyusunan penelitian ini
7. Kepada Teman Teman saya yang telah memeberikan saran serta semangat kepada saya

KATA PENGANTAR

Bismillabirohmanirohim,

Assallamualaikum Warahmatullabi Wabarokatub

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022”. Sholawat serta salam tidak lupa panjatkan kepada Rasullulloh SAW sebagai suri tauladan di muka bumi ini dan nanti kita nantikan syafaatnya di *yaumul kiamab*. Penelitian ini dilakukan serta diselesaikan untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti mengakui masih terdapat banyak kekurangan. Selain hal tersebut dalam penelitian ini banyak pihak yang berkontribusi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut atas do’a, bimbingan serta bimbingan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada :

1. Teruntuk Alm Bapak, saya persembahkan hasil ini untuk beliau diatas sana. Hasil skripsi ini merupakan keinginan yang beliau inginkan dari putri kecilnya dulu.
2. teruntuk diri saya sendiri karena sudah kuat dan selalu bertahan hingga bisa menyelesaikan penulisan ini.
3. Teruntuk Ibu, dan Keluarga saya yang telah memberikan doa serta support selama penyusunan penelitian ini.
4. Teruntuk Dwi Syafrillia yang telah membantu, meberikan semangat dan selalu memberikan dukungan pada peneliti selama melakukan penulisan ini.
5. Kepada Teman Teman saya yang telah memebrikan saran serta semangat kepada saya
6. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Johan Arifin, S.E. M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Diana Wijayanti S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu serta waktu hingga tenaga untuk memberikan peneliti bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
10. Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana
11. Kepada semua teman teman saya yang telah memberikan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian ini hingga selesai.
12. Terima Kasih kepada Kontrakan Maju Jaya, yang telah tempat saya dalam penyusunan penelitian ini
13. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat peneliti butuhkan agar penelitian ini lebih baik lagi. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Wassallamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatub

Yogyakarta, 22, Desember 2023

Tiara Novita Dewi

DAFTAR ISI

COVER	i
SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1. Kajian Pustaka.....	10
2.2. Landasan Teori.....	24
2.2.1. Kemiskinan	24
2.2.2. Pengangguran	28
2.2.3. Upah Minimum	30
2.2.4. PDRB.....	32
2.2.5. IPM.....	35
2.3. Kerangka Berfikir	37
2.4. Hipotesis	37
BAB III.....	39

METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Jenis dan Pengumpulan Data	39
3.2. Definisi Operasional Variable	39
3.3. Metode Analisis	41
3.4.1. Common Effect Model (CEM).....	43
3.4.2. Fixed Effect Model (FEM)	44
3.4.3. Random Effect Model (REM)	44
3.4.4. Tahapan Analisis Data	45
3.4. Uji Asumsi Klasik.....	47
3.4.1. Uji Normalitas	47
3.4.2. Uji Multikolinearitas	47
3.4.3. Uji Heteroskedasitas	47
3.4.4. Uji Autokorelasi.....	48
3.5. Uji Statistik.....	48
3.5.1. Uji Parsial (Uji t)	48
3.5.2. Uji Simultan (Uji F)	48
3.5.3. Koefisien Determinasi (R^2).....	49
BAB IV	50
PEMBAHASAN	50
4.1. Analisis Data	50
4.2. Analisis Regresi Data Panel.....	51
4.2.2. Hasil Uji Chow	52
4.2.3. Uji Hausmant	53
4.3. Uji statistic.....	53
4.3.1. Koefisien Determinasi	53
4.3.2. UJI F	54
4.3.3. UJI t.....	55
4.4. Hasil dan Pembahasan.....	55
BAB V	59
SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	59

DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN DATA.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.....	2
Gambar 1.2. Tinggal Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar 1.3. Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Tengah.....	4
Gambar 1.4. Tingkat Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 1.5. Tingkat PDRB Di provinsi Jawa Tengah.....	6
Gambar 1.6. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah.....	7
Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4. 1. Hasil Statistik Deskriptif	<u>50</u>
Tabel 4. 2. Hasil Uji FEM	51
Tabel 4. 3. Hasil Uji Chow	52
Tabel 4. 4. Hasil Uji Hausman.....	53
Tabel 4. 5. Hasil Koefisien Determinasi	54
Tabel 4. 6. Hasil Uji F	54
Tabel 4. 7. Hasil Uji t	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitain	63
Lampiran 2. Hasil Fixed Effect	68
Lampiran 3 Common Effect	68
Lampiran 4. Hasil Random Effect.....	69
Lampiran 5. Hasil Uji Chow	70
Lampiran 6. Uji Hausman	72

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah besar di Indonesia, negara berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang terus dicari solusi dan upaya untuk diatasi oleh pemerintah. Kompleksitas permasalahan kemiskinan ditinjau dari sebab dan akibat menyebabkan banyak ilmuwan tertarik untuk mengkajinya. Kemiskinan merupakan permasalahan penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya permasalahan kemiskinan. Untuk memahami permasalahan kemiskinan yang muncul, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih pada setiap daerah di tingkat daerah. Di tingkat lokal dan nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi utama. kurangnya kesempatan, rendahnya keterampilan, rendahnya tingkat keselamatan, dan rendahnya tingkat kompetensi atau penentuan nasib sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pengangguran, upah minimum, PDRB dan indeks pembangunan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan data *cross-section* dan *time series* dan diolah dengan menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah variabel tingkat pengangguran, sedangkan variabel upah minimum, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : *Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan IPM*

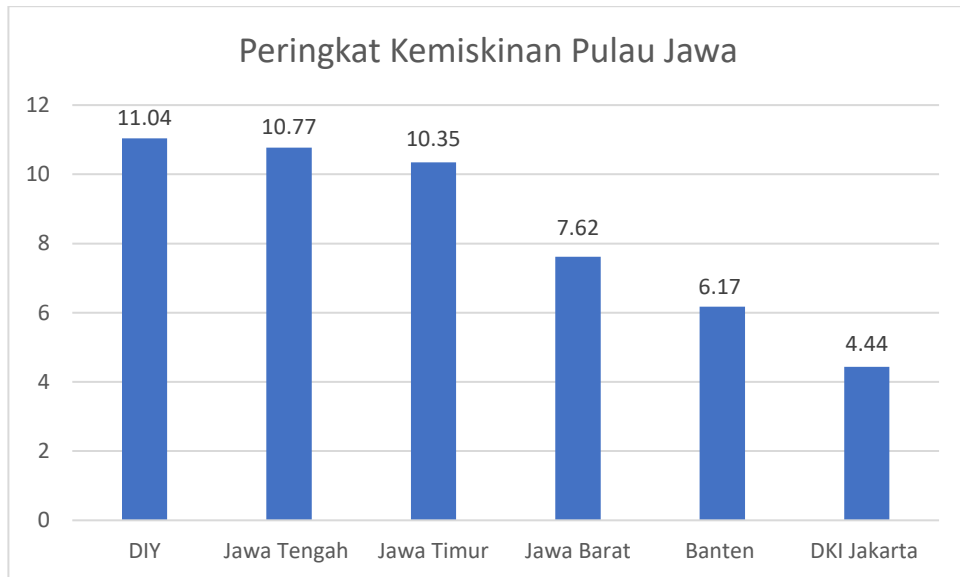
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang menjadi topik utama di negara Indonesia yang dimana menjadi negara yang sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah utama yang terus dicari penanganan serta upaya pemerintah untuk mengatasinya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terus dilakukan dengan berbagai cara demi menurunkan permasalahan tersebut. Secara kompleksnya, masalah kemiskinan jika dilihat dari sebab serta akibatnya menyebabkan banyak ilmuwan yang tertarik untuk mempelajarinya. Kemiskinan menjadi isu penting dalam kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Dimana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan permasalahan kemiskinan. Dalam memahami suatu permasalahan tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia, perlu adanya suatu perhatian lebih pada setiap masing masing daerah, pada tingkat lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimesnsi pokok, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level of security*), dan ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*). Dalam mengatasi kemiskinan, baik secara lokal maupun nasional ini pemerintah melaksanakan berbagai agenda pemulihan ekonomi.

Permasalahan mengenai urusan kemiskinan berdampak juga bagi perekonomian suatu negara semakin meningkatnya jumlah kemiskinan di dalam suatu negara terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang ini, dapat memiliki dampak yang sangat besar apabila permasalahan kemiskinan ini tidak di pikirkan oleh negara. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam masalah kemiskinan diantaranya seperti seperti pengangguran, PDRB, pengeluaran pemerintah dan upah minimum.

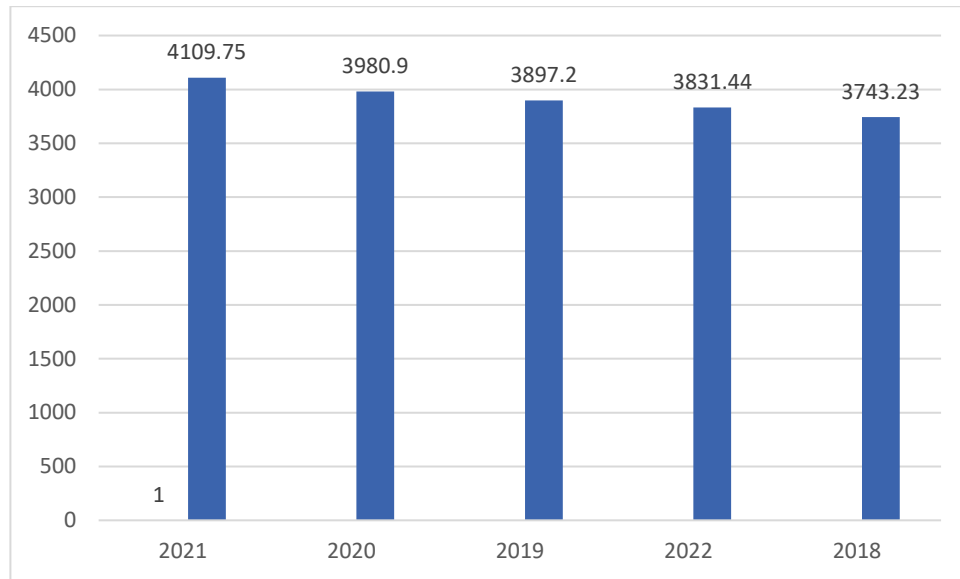


Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

(Sumber : BPS 2023)

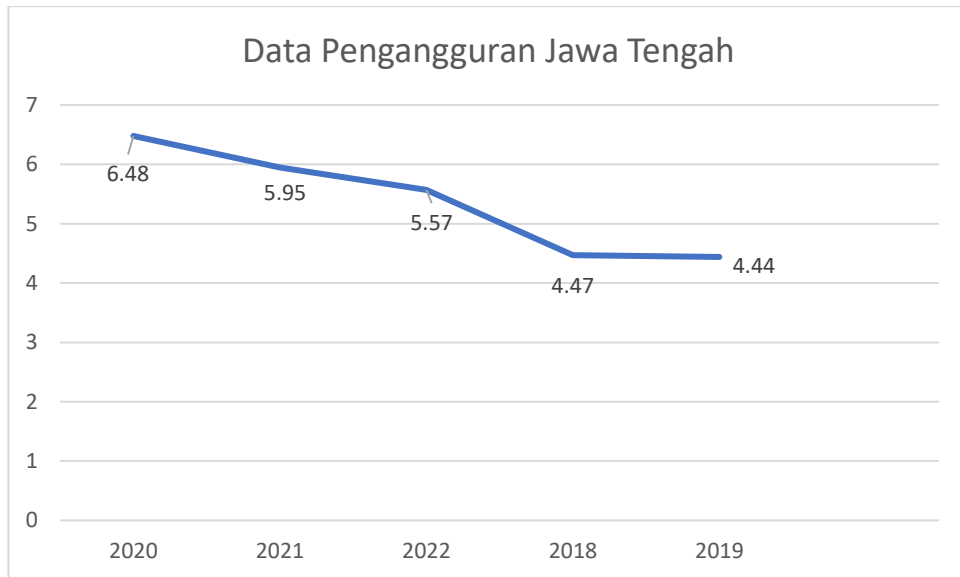
Daerah provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah provinsi di pulau Jawa yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata. Pada tahun 2023 provinsi Jawa Tengah mencapai tingkat kemiskinan yang menempati pada urutan ke 2. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang relatif memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan jumlah kepadatan penduduk miskin yang tinggi ini telah mencapai presentase kemiskinan diatas 10%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di pulau jawa, provinsi Jawa Tengah ini mencapai tingkat kemiskinan dalam presentase sebesar 10,77%, presentase tersebut dapat terbilang cukup besar apabila dibandingkan dengan Provinsi besar lainnya yaitu pada provinsi DKI Jakarta yang mencapai tingkat presentase kemiskinan hanya sebesar 4,44%. Secara umum kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan cukup bagus, namun Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sebagai Provinsi yang mempunyai permasalahan mengenai kemiskinan yang dapat dikatakan tinggi (Wahyudi and Rejekingsih 2013). Kondisi yang dialami oleh provinsi Jawa Tengah

ini digambarkan secara sistematis dan aktual sesuai data yang ada. Menganalisis berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).



Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah
(Sumber : BPS 2023)

Jumlah kemiskinan yang dialami oleh provinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan serta penurunan seperti dijelaskan pada gambar 1.2 mengenai tingkat jumlah penduduk miskin Jawa Tengah yang diinput dari data Badan Pusat Statistik tahun 2018-2022 menjelaskan pada tahun 2021 merupakan tahun tertinggi jumlah penduduk miskin mengalami pelonjakan yang cukup tinggi sebesar 4,109,75 juta jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,980,9 juta jiwa, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi 3831,44 jiwa, namun jumlah tersebut menurun hanya sekitar 278,31 juta jiwa. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi masalah kemiskinan yang saling berkaitan. Lonjakan penduduk miskin akan berkaibat pada tidak tercapainya tujuan Pembangunan ekonomi seperti kesejahteraan Masyarakat yang dimana akan terus menekan angka kemiskinan.

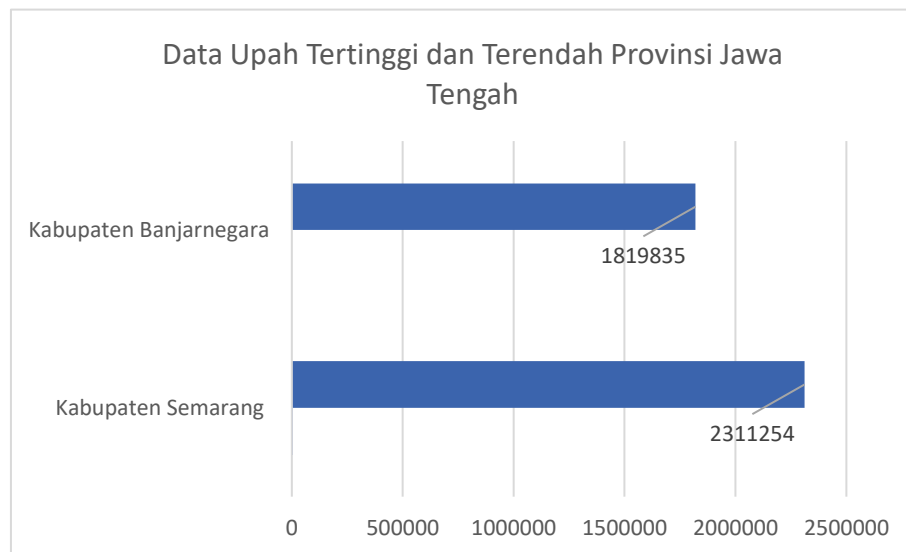


Gambar 1.3. Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Tengah
(Sumber : BPS 2023)

Gambar 1.3 menunjukkan mengenai tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 6.48% penduduk jiwa, hal tersebut berkaitan dengan terjadinya kasus Covid-19 yang menyebabkan banyak para pekerja yang di PHK oleh tempat kerja masing masing. Selain hal tersebut tingkat pengangguran yang rendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 4.44%. Permasalahan pengangguran menjadi masalah pada tingkat makro yang dapat mempengaruhi secara langsung dan merupakan yang paling berat terhadap peningkatan kemiskinan. Seperti terlihat pada Gambar 1.3 bahwa masih banyak daerah kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang tingkat penganggurannya masih dikatakan tinggi. Efek buruk yang terjadi dari meningkatnya pengangguran ini akan mengurangi pendapatan masyarakat yang kemudian dapat menurunkan juga tingkat kemakmuran. Semakin menurunnya tingkat kemakmuran dalam suatu Masyarakat tentunya dapat meningkatkan juga peluang terjebaknya dalam lubang kemiskinan.

Apabila tingkat pengangguran terus mengalami peningkatan maka memberi efek buruk lainnya juga pada kekacauan politik, sosial serta prospek Pembangunan ekonomi di masa depan.

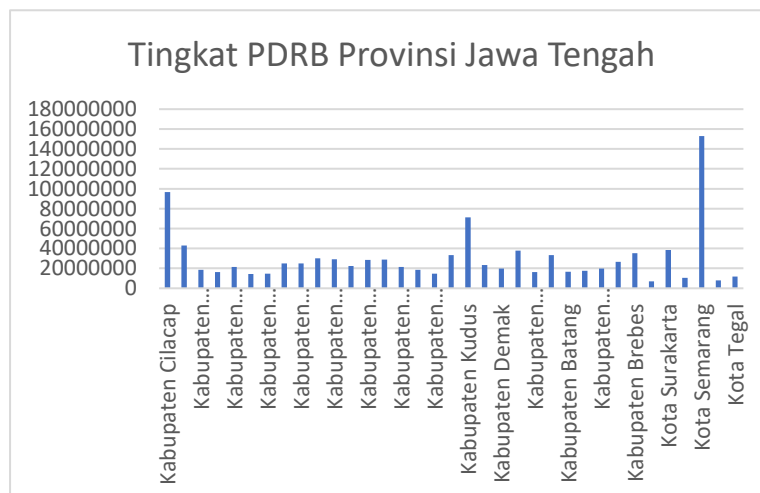
Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan salah satunya dalam penerapan upah minimum, tujuan ditetapkannya upah minimum yang tinggi agar membuat standar hidup Masyarakat terjamin hal tersebut juga memiliki dampak terhadap faktor lain seperti kesehatan sehingga upah yang lebih tinggi akan dikaitkan dengan Tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi (Kauffman,1999). Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan tingkat pendapatan sehingga dapat membantu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.



Gambar 1.4. Data Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah

(Sumber : BPS 2023)

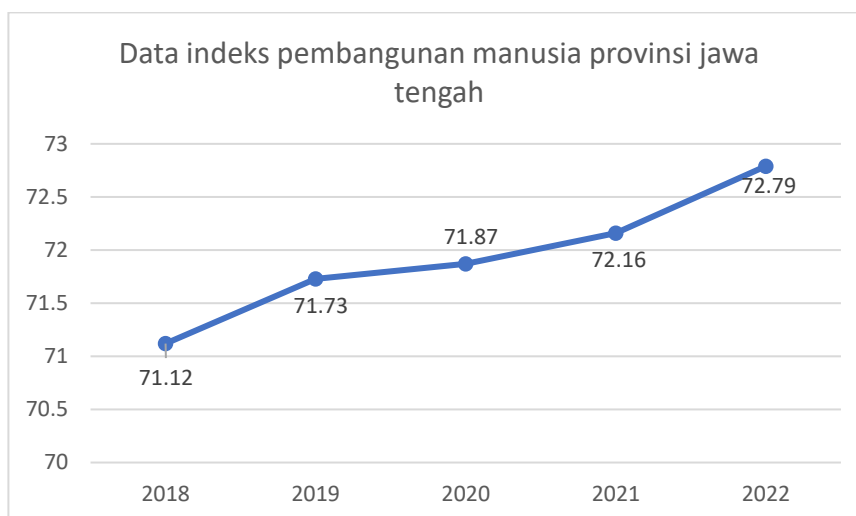
Upah merupakan salah satu yang digunakan para pekerja untuk meningkatkan suatu kesejahteraan. Masyarakat. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 tingkat upah minimum tiap kabupaten di provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kabupaten di daerah provinsi Jawa Tengah yang menempati upah tertinggi yaitu kabupaten semarang yaitu sebesar 2,311,254 juta rupiah pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan, dan kabupaten yang memiliki tingkat upah terendah yaitu kabupaten Banjarnegara sebesar 1,819,835 juta rupiah pada tahun 2022. Kenaikan upah minimum ini juga nantinya akan meningkatkan daya beli Masyarakat, yang tentunya akan meningkatkan tingkat konsumsi pada Masyarakat menjadi lebih tinggi. Peningkatan pada upah minimum ini berdampak juga pada kenaikan barang kebutuhan bagi Masyarakat, dimana harga produksi Pembuatan akan meningkatkan dan berpengaruh juga pada upah para pegawainya. Kenaikan pada upah para pegawai ini apabila tidak dapat dioenuhi dengan baik maka akan menyebabkan masalah pemberhentian para pegawai untuk mencapai tingkat laba pada perusahaanya. Permasalahan pemberhentian karyawan secara paksa ini akan menambha tingkat pengangguran yang dapat menghambat pada PDRB.



Gambar 1.5. Data PDRB di provinsi Jawa Tengah

(Sumber : BPS 2023)

PDRB menjadi salah satu faktor yang meningkatkan angka kemiskinan dalam perekonomian. Hubungan antara Pendidikan dengan kemiskinan memang sudah menjadu masalah yang sudah lama dialami di berbagai Negara, baik negara maju dan negara berkembang, Berbagai anggapan mengenai Pendidikan dan kemiskinan bahwa dengan kualitas Pendidikan yang baik maka akan memperbaiki tingkat kemiskinan, sehingga Ketika tingkat Pendidikan yang tinggi dapat dianggap bahwa dapat mendapat pekerjaan yang layak dan mapan dan mendapatkan upah yang tinggi.



Gambar 1.6. Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah

(Sumber : BPS 2023)

Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada gambar 1.5 pada tahun 2018-2022 mengalami lonjakan peningkatan terus menerus. Perekonomian yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan kondisi ekonomi menjadi tidak stabil, hal tersebut berdampak juga bagi sektor yang terlibat dalam Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Indonesia. Menurut Arsyad (1999:242) dalam (Alfianto et al 2019), untuk mengurangi suatu permasalahan terkait kemiskinan dapat dilakukan dengan cara membangun kualitas

manusia, serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan pada sektor pendidikan, serta kesehatan. Dalam mencapai suatu tingkat kesejahteraan Masyarakat dapat dicapai melalui kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari nilai IPM, dimana hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kesejahteraan Masyarakat akan semakin membaik atau dapat dikatakan kemiskinan akan turun (Alfianto et al 2019). Dengan melibatkan Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, dapat memperlihatkan secara parsial mengenai hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan yang ada di Jawa Tengah, dengan meneliti Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan bagian dari proposal yang mengulas mengenai pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestic Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022. Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian:

- a. Bagaimana pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah?
- b. Bagaimana pengaruh antara Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah?
- c. Bagaimana pengaruh antara PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah?
- d. Bagaimana pengaruh antara IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh antara tingkat pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah

- b. Untuk menganalisis pengaruh antara Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah
- c. Untuk menganalisis pengaruh antara PDRB dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah
- d. Untuk menganalisis pengaruh antara IPM dengan Tingkat Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi tentang penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan menggunakan variable serta persamaan yang sama, sehingga mampu dijadikan sebagai referensi. Didalam penelitian tersebut memuat dan berisi informasi yang penting. penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nia Mari'atus S, dkk (2022) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Yogyakarta tahun 2013-2019”. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa variable pertumbuhan ekonomi, upah minimum, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Inflasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2019.

Nadia Islami, dan Ali Anis (2019), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut peneliti ingin menguji mengenai variable upah minimum Pendidikan serta kesehatan terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode OLS pada periode 2012-2017. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa upah minimum kesehatan serta Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan hal ini didapatkan dengan melihat hasil regresi R-Squared sebesar 0,998164 atau 99,81% dapat dijelaskan oleh variable tersebut.

Devie Triana Sari, Nur Isoatul Khusna, Fajar Wulandari (2023). Peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kemiskinan di

Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan Sosial, Ekonomi, Lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia”. Pada penelitian tersebut membahas mengenai sejauh mana faktor terkait kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa variable pengangguran PDRB, IPM Inflasi, serta angka putus sekolah, bahkan jarak ke pusat kota berpengaruh dan signifikan terhadap terjadinya kemiskinan.

Yuia Adella Sari (2021), melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran Terbuka dan Jumlah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran terbuka serta jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dijelaskan juga pada hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*).

Manisaha Elok Sholikhati, Wardono (2020). melakukan penelitian yang berjudul “Analisis PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Investasi PMA Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai faktor faktor yang mempengaruhi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah diantaranya meliputi variable Produk Domestik Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Investasi PMA. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh secara bersamaan antara variable yang ada terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, dimana apabila pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Investasi PMA 0 maka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,69469%.

Tabel 2.1. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Judul & Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
<p>Devie Triana Sari, Nur Isroatul Khusna, Fajar Wulandari (2023)</p> <p>Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan Sosial, Ekonomi, Lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>Metode : Analisis regresi linier berganda</p> <p>Variable Independen : Tingkat pengangguran,</p>	<p>Hasil Penelitian :</p> <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variable yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan. variabelnya yaitu Tingkat pengangguran, kemudian PDRB, IPM, Inflasi, angka putus sekolah serta yang terakhir merupakan jarak ke pusat kota. Implikasi dari penemuan yang dilakukan oleh peneliti tersebut dapat memberikan acuan kepada pemerintah agar mengambil Langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Hal yang dilakukan tersebut dilakukan untuk membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mendorong investasi,</p>	<p>Persamaan Penelitian :</p> <p>Memiliki persamaan dalam salah satu variable dependen yakni Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Perbedaan Penelitian :</p> <p>Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.</p>

<p>Jarak Kabupaten/Kota ke pusat Semarang, PDRB, IPM, dan Inflasi</p> <p>Variable dependent : Kemiskinan</p>	<p>memperbaiki sektor-sektor utama, menstabilkan upah, serta memberikan dukungan pendidikan.</p>	
<p>Nia Mariatus S, Teguh Hadi Priyono, Duwi Yunitasari (2022)</p> <p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Yogyakarta Tahun 2013-2029</p> <p>Metode : Kuantitatif, analisis regresi panel.</p>	<p>Hasil penelitian: variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, hal ini terjadi karena variable pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan karena terdapat peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang akan mengurangi kemiskinan yang terjadi. variable inflasi mempunyai dampak positif terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan inflasi yang mempengaruhi harga secara keseluruhan. Meskipun variable</p>	<p>Persamaan penelitian: Memiliki persamaan dalam salah variable dependen yakni PDRB dan Upah Minimum, serta persamaan metode analisis data panel.</p> <p>Perbedaan Penelitain : Penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan tahun penelitian. Perbedaan lain yang ada terdapat perbedaan variable dependen.</p>

<p>Variable Independen : PDRB, Inflasi, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah</p> <p>Variable dependen : Jumlah Penduduk Miskin</p>	<p>pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran langsung serta tidak langsung memiliki dampak positif terhadap kemiskinan namun hasil tersebut tidak sesuai dengan teori karena terdapat penyerapan pengeluaran pemerintah yang dilakukan dengan Upaya pada disetiap negara bagian dalam hal alokasi sumberdaya dan efisiensi waktu.</p>	
<p>Nadia Islami, dan Ali Anis (2019)</p> <p>Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia.</p> <p>Metode : kuantitatif, Analisis analisis model panel</p>	<p>Hasil penelitian : Berdasarkan hasil analisis penelitian antara variable dependen terhadap variable independent seperti yang telah dijelaskan, maka dapat hasil penelitian tersebut: Upah Minimum, Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indoensia</p>	<p>Persamaan penelitian : Memiliki persamaan analisis regresi model panel. terdapat persamaan pada variable upah minimum</p> <p>Perbedaan penelitian : Penelitian penulis yang dilakukan yaitu pada objek dan tahun penelitian.</p>

<p>Variable Independen : Upah Minim, Pendidikan, Kesehatan</p> <p>Variable dependen : Kemiskinan</p>		
<p>Anak Agung Istri Dea Ananda Semara, I Nyoman Mahendra Yasa (2021)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasu Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang positif serta signifikan, sementara investasi tidak berpengaruh oleh hal tersebut, sedangkan pendapatan asli daerah mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan Tingkat kemiskinan, dan investasi tidak mempunyai hubungan dengan dua hal tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan variable yang negatif arti dari hal itu yaitu</p>	<p>Persamaan Penelitian : Memiliki persamaan anilisi regresi model panel. terdapat persamaan pada variable pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Perbedaan Penelitian : Penelitiian yang penulis lakukan yaitu pada objek penelitian serta tahun penelitian. selain itu perbedaan lainnya terdapat pada metode analisis regresi berganda.</p>

<p>Metode : Analisa Regresi Berganda</p> <p>Varaibel Independen : Pendapatan Asli Daera (PAD), Investasi, Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>Varaibel dependen : Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan.</p>	<p>bahwa pendapatan asli suatu daerah mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap Tingkat kemiskinan.</p> <p>Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, Tingkat pengangguran yang berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dan jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, hal tersebut memberikan dampak positif yang signifikan.</p>	
<p>Yulia Adelia Sari (2021)</p> <p>Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pneduduk</p>	<p>Hasil yang didapatkan pada penelitian mendapatkan hasil bahwa variable upah minimum memiliki pengaruh negative serta signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, sedangkan variable tingkat pengangguran terbuka dan</p>	<p>Persamaan penelitian : pada penelitian ini yaitu pada variable upah minimum dan tingkat pengnagguran, selain itu persamaan lainnya terdapat pada objek penelitiannya</p> <p>Perbedaan penelitian :</p>

<p>terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Metode : kuantitatif, melalui analisis linier berganda dengan model <i>Ordinary Least Square (OLS)</i>.</p> <p>Variable Independen : Upah Minimum, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk</p> <p>Variable dependen : Tingkat Kemiskinan.</p>	<p>jumlah penduduk memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada metode yang digunakan yaitu analisis linier berganda dengan OLS</p>
<p>Erliza Millenia Putri, Dewi Zaini Putri (2021)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan</p>	<p>Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada analisis yang digunakan yaitu</p>

<p>Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia.</p> <p>Metode : Analisis Regresi Data Panel</p> <p>Variable dependen : Kemiskinan</p> <p>Variable Independen : Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah</p>	<p>terhadap kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.</p>	<p>menggunakan analisis data panel, persamaan pada variable independent yaitu pengangguran dan upah minimum serta variable dependen yaitu kemiskinan.</p> <p>Perbedaan penelitian : perbedaan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada lokasi objek penelitian</p>
---	--	---

<p>Damas Bagas Mahendra, Yuni Prihadi Utomo (2023)</p> <p>Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2017-2019</p> <p>Metode : Analisis regresi data panel.</p> <p>Variable Independen : Angkatan kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan pada tahun 2018-2021, Tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh belanja pemerintah dan upah minimum kabupaten/kota, namun di sisi lain Angkatan kerja, indeks Pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi serta PDB pertanian tidak berpengaruh terhadap pengangguran.</p>	<p>Persamaan Penelitian : Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada pengambilan variable yang mempengaruhi yaitu pada variable Indeks Pembangunan Manusia (IIPM), Serta Analisis regresi data panel.</p> <p>Perbedaan Penelitian : Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada variable dependen dan periode penelitian.</p>
---	--	--

<p>Ekonomi, Proporsi PDRB Pertanian</p> <p>Variable dependen : Tingkat Pengangguran</p>		
<p>Dewi Martin, Nenik Woyanti (2022)</p> <p>Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2016- 2020)</p> <p>Metode : Analisis Regresi data panel</p> <p>Variable Independen : PDRB, Indeks</p>	<p>Hasil pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu variable independent PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negative dan signifika sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.</p>	<p>Persamaan : memiliki persamaan pada variable independent yang digunakan oleh peneliti</p> <p>Perbedaan : Perbedaan yang ada pada penelitian itu yaitu pada tahun periode yang diteliti</p>

<p>Pembangunan Manusia, Pengangguran</p> <p>Variable dependen : Penduduk Miskin</p>		
<p>Imam Prayogo, Maulidyah Indira Hasmarini (2022)</p> <p>Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB, Jumlah Penduduk terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Yogyakarta Tahun 2018-2021</p> <p>Metode : Analisis regresi data panel</p> <p>Variable Independen : Indeks Pembangunan</p>	<p>Hasil penelitian : Di Daerah Istimewa Yogyakarta, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi secara positif oleh variable PDRB serta Jumlah penduduk, sedangkan variable IPM berkorelasi negatif dampaknya signifikan bagi provinsi Yogyakarta.</p>	<p>Persamaan penelitian : Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada pengambilan variable yang mempengaruhi yaitu pada variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan variable PDRB, Serta Analisis regresi data panel.</p> <p>Perbedaan penelitian : Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu variable dependen penelitian, objek penelitian serta periode penelitian yang digunakan.</p>

<p>Manusia, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk.</p> <p>Variable dependen : Tenaga Kerja</p>		
<p>Dewi Martini, Nenik Woyanti (2022)</p> <p>Analaisi Pengaruh PDRB, IPM, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020)</p> <p>Metode : Analisi Regresi data panel</p> <p>Variable Independen :</p>	<p>Hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu Variable PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variable pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.</p>	<p>Persamaan penelitian : memiliki persamaan pada variable Independen dan variable dependen serta objek penelitian</p> <p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yaitu pada tahun penelitian yang dilakukan</p>

<p>PDRB, IPM, Pengangguran</p> <p>Variable dependen : Kemiskinan</p>		
<p>Indah Tri Utami, Mohammad Rofiuddin (2022)</p> <p>Analisis Pengaruh upah Minimum, Belanja Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Mayoritas Muslim</p> <p>Metode : Analisi Regresi data panel</p> <p>Variable Independen : Upah Minimum, Belanja</p>	<p>Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :</p> <p>Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di Indonesia, sedangkan Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah mengurangi kemiskinan di Provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di Indonesia. Sedangkan jika secara simultan Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan didaerah mayoritas muslim di Indonesia.</p>	<p>Persamaan penelitian : terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi data panel, serta persamaan pada variable dependen yang diteliti.</p> <p>Perbedaan Penelitian : terletak pada objek tempat yang diteliti serta terdapat beberapa perbedaan pada variable Independen.</p>

Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variable dependen : Kemiskinan		
--	--	--

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kemiskinan

Banyak definisi mengenai kemiskinan, keberagaman definisi ini dikarebakan banyaknya masalah yang telah mencapai tingkat level yang tinggi dimana kemiskinan ini berkaitan dengan berbagai faktor disekitarnya. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum yang sepadan dengan kualitas hidup (Todaro,2006). Pendapat lain dari Sharp dkk. Mudrajat Kunchoro (2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sudut pandang ekonomi; a) pada tingkat mikro, kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan kepemilikan sumber daya antar individu, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. b) kemiskinan muncul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia. c) kemiskinan muncul karena adanya perbedaan antar individu dalam akses terhadap modal. Kriteria penyebab kemiskinan tersebut menimbulkan teori lingkaran setan kemiskinan.

Menurut Kakwani dan Silber (2008), menjelaskan mengenai analisis kemiskinan yang berkaitan mengenai rendahnya distribusi kesejahteraan. Pada umumnya dalam mengukur permasalahan kemiskinan melibatkan pada 3 tahapan yaitu memilih indikator yang sesuai dengan kesejahteraan individunya,

selanjutnya memilih garis kemiskinan yang dapat mengidentifikasi untuk dijadikan objek, dan tahap yang terakhir yaitu memilih individu yang fungsional untuk mengumpulakan masing-masing individu.

Menurut Chamsyah (2008), penyebab kemiskinan terletak pada bentuk hubungan yang kompleks antara individu yang hidup dengan kekuasaan yang lemah dalam tradisi keluarganya, dan masyarakat dalam struktur sosial (negara) yang kompleks, yang hidup dan cara produksinya menganut cara-cara modern. sistem. . Dalam keadaan kekurangan kekayaan ini, manusia dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan. Alasan lainnya adalah keluarga hanyalah institusi sosial terkecil yang dilemahkan oleh struktur sosial yang menjadi penyebab struktural kemiskinan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, penyebab-penyebab tersebut menjadi tidak relevan lagi. Kemiskinan mengacu pada kondisi situasi individu, kelompok, atau kolektif dalam masyarakat.

Kemiskinan di Chile tahun 2004 penelitian tersebut dilakukan oleh Alejandro Foxley. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Chili menerapkan berbagai kebijakan sosial dan Langkah-langkah pro terhadap pertumbuhan untuk mengurangi angka kemiskinan. Melalui Kebijakan sosial, pemerintah melakukan peningkatan belanja sosial untuk keselamatan serta kesehatan. Dampak belanja sosial dapat mengurangi kemiskinan dan sektor sosial yang sangat efektif dalam mengurangi Tingkat kemiskinan serta ketimpangan yang terjadi di Chile. Kebijakan tersebut mengurangi kemiskinan, yang dilihat dari upah riil yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih tinggi, serta tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Wardhana (2010) mengidentifikasi kemiskinan multidimensi sebagai isu yang berdampak pada Pendidikan, kesehatan, dan karakteristik rumah tangga dalam jangka pendek serta jangka panjang. SMERU (2003) menegaskan mengenai dalam mengemukakan bahwa fenomena kemiskinan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidakberdayaan, kemiskinan materi, keterasingan

dan lain-lain. Temuan-temuan tersebut menunjukkan mengenai adanya perubahan terkait paradigma dalam system Pendidikan dan perlunya dalam meningkatkan akses terhadap Pendidikan, laangan kerja dan peluang usaha bagi Masyarakat miskin.

Sebuah studi oleh Iswanto dkk. (2008) mengungkapkan bahwa penyebab utama kemiskinan di Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang disebabkan oleh minimnya alokasi sumber daya pendidikan dan banyaknya guru yang tidak kompeten di bidang keahliannya. Dan hasil yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Faktor lain yang mempengaruhi jebakan kemiskinan antara lain ketersediaan investasi, jumlah tenaga kerja, dan kinerja sektor pertanian. Kwak dan Smith (2011) mengembangkan konsep perangkap kemiskinan berdasarkan model dinamis asset rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan data 1.477 rumah tangga di 15 desa dari Survei Rumah Tangga Pedesaan Ethiopia (ERHS). Temuannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa dimensi kemiskinan: jebakan malnutrisi dan jebakan buta huruf.. Ibnu salam Harahap (2004) menggunakan sampel 35 % dari populasi pada setiap desa dengan metode random sampling. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa-desa tersebut merupakan kemiskinan absolut. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah relative rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga, namun hal tersebut mungkin tidak berdampak signifikan terhadap kemsikinan.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan, Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebagai ketidakmampuan ekonomi, namun juga sebagai tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perlakuan yang tidak setara terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara universal meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan lingkungan hidup, perawatan kesehatan dan keamanan dari ancaman

kekerasan, serta partisipasi dalam masyarakat. kekerasan. kehidupan politik. Kemiskinan mempunyai banyak dampak negatif. Kemiskinan tidak hanya menimbulkan banyak permasalahan sosial, namun juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi meningkatkan biaya pembangunan ekonomi dan dapat menghambat Pembangunan ekonomi secara tidak langsung. Multiplier yang kecil disebabkan karena Masyarakat miskin memiliki daya beli yang rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bisa bertumbuh dengan pesat.

Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar BPS untuk mengukur kemiskinan. BPS dapat diukur dengan menggunakan indeks *head count*, yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena garis kemiskinan secara efektif ditetapkan pada tingkat yang tetap, angka kemiskinan dapat dikurangi dengan melacak kemajuan pengentasan kemiskinan dari waktu ke waktu. Kemiskinan mempunyai beberapa penyebab diantaranya, Pertama Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh suatu suprastruktur dimana pada anggota bahkan kelompok masyarakat tertentu menguasai sarana-sarana ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Struktur ini yang dapat mengakibatkan berkurangnya pada pemerataan, kualitas serta kreativitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan juga dalam memarjinalisasi partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan. Kedua, Kemiskinan budaya, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya. Dalam antropologi disebut “Koentjaraningrat” atau “Koentjaraningrat”, karena adanya budaya miskin maka terdapat budaya mental kemiskinan yang akibatnya mengurangi upayanya menuju kemajuan. Program pengentasan kemiskinan semakin banyak, namun masyarakat miskin masih banyak. Tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara bergantung pada dua faktor utama: rata-rata tingkat pendapatan nasional dan luas atau sempitnya ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan di negeri ini akan terus bertambah parah. Dan

sebaliknya. Ketimpangan akan terus meningkat terlepas dari distribusi pendapatan per kapita di suatu negara dan wilayah.

2.2.2. Pengangguran

Menurut Lipsey, dkk (2001) Pengangguran normal/friksional, pengangguran siklis (huruf kecil), pengangguran structural, dan pekerjaan berupah rill merupakan tiga penyebab terjadi pengangguran. Menurut Soekirno (2006) pengangguran merupakan “seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencarai pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Penelitian oleh Pramana dan Arianti (2012) dengan judul analisis pengaruh PDRB, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004- 2009” menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012) yang berjudul pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan inflasi dan pengangguran berdampak negatif terhadap kemiskinan. Pengangguran merupakan masalah sosial serius yang dapat memicu atau memperburuk kemiskinan. Teori pengangguran friksional dan struktural (Cain, 1976) memberikan wawasan tentang bagaimana tingkat pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

Menurut Sukirno (2004), dampak negatif pengangguran terhadap kemiskinan adalah kurangnya lapangan kerja mengurangi pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi kekayaan yang diperolehnya. Tidak mengherankan

jika masyarakat kurang bahagia karena pengangguran juga meningkatkan risiko mereka jatuh miskin karena kurangnya pendapatan. Ketika tingkat pengangguran sangat tinggi di suatu negara, gejolak politik dan sosial dapat terjadi, yang berdampak negatif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno (2004), dampak negatif pengangguran terhadap kemiskinan adalah kurangnya lapangan kerja dimana hal tersebut mengurangi pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi kekayaan yang diperolehnya. Tidak mengherankan apabila masyarakat tidak meng-alami kesejahteraan karena pengangguran juga meningkatkan risiko mereka jatuh miskin karena kurangnya pendapatan. Ketika tingkat pengangguran sangat tinggi di suatu negara, gejolak politik dan sosial dapat terjadi, yang berdampak negatif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi.

Pengangguran terjadi di semua negara, dan pengangguran reguler disebabkan oleh masa transisi, ketika masyarakat telah keluar dari pekerjaan sebelumnya serta belum mendapatkan pekerjaan baru, dan ketika mereka baru saja menyelesaikan pelatihan dan mencari pekerjaan baru (Mankiw, 2018). Pengangguran suatu kondisi dimana mereka yang merupakan angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan (Todaro & Smith, 2015). Pada dasarnya waktu yang digunakan orang dapat dikategorikan menjadi dua bagian: yang pertama waktu kerja dan yang kedua waktu senggang (Weiss, 2009). Oleh karena itu, orang menyesuaikan preferensinya setelah jam penggunaan. Kondisi ini mewakili kombinasi pendapatan dan waktu luang dengan melihat Tingkat kepuasan pada kurva indiferen. Tetapi, permintaan serta penawaran tenaga kerja bergantung pada faktor upah, karena merupakan salah satu penyebab pengangguran yang disebabkan oleh tidak fleksibelnya upah yang terjadi pada pasar tenaga kerja (Kaufman & Hotchkiss, 1999). Dalam keseimbangan, terdapat kesempatan kerja penuh, namun resesi menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja (Patinkin, 1949). Pengangguran dianggap

sebagai akar penyebab kemiskinan, apabila tidak terkendali maka dapat mempengaruhi laju perekonomian. Pengangguran dapat menghalangi masyarakat untuk memaksimalkan kekayaannya, karena peningkatan pengangguran biasanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini, pemerintah perlu menciptakan sistem yang dapat memberdayakan angkatan kerja. Kesempatan kerja juga diharapkan meningkat karena pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada pekerja. Semakin banyak orang yang bekerja maka semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan (Trisnu & Sudiana, 2019).

2.2.3. Upah Minimum

Upah merupakan suatu sumber pendapatan, apabila suatu pendapatan berkurang ataupun tetap sama, yang terjadi akan berdampak bagi kesejahteraan yang akan berkurang juga, atau dipertahankan yang tentunya akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kenaikan suatu upah minimum memiliki tujuan untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kebutuhan masyarakat, hal tersebut juga menjadi faktor pendorong untuk mengurangi suatu kemiskinan dan berdampak juga pada perekonomian secara keseluruhan kedepan. Sadono Sukirno (2005), membedakan dua pengertian mengenai upah, yang pertama upah nominal (upah moneter) yaitu uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai imbalan atas tenaga mental dan fisik yang telah dikeluarkan dalam proses suatu produksi. Kedua upah riil yaitu upah pekerja yang diukur berdasarkan kemampuan dalam membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Upah minimum dapat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kemiskinan. Penelitian oleh Card dan Krueger (1994) tentang dampak kenaikan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman ini. Hal yang dilakukan untuk meningkatkan derajat penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan pendapatan yang

rendah yaitu dengan menggunakan kebijakan Upah minimum (Kaufman, 2000). Selain itu terdapat tujuan penetapan upah dilakukan untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan dan kesejahteraan sehingga semakin tinggi upah maka akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Kaufman, 1999). Penelitian yang dilakukan oleh Askenazy (2003) didapatkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada akumulasi modal manusia.

Upah minimum mengacu pada jumlah uang minimum dan pantas yang harus dibayarkan perusahaan kepada upah atau gaji bulanan kepada karyawannya. Penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa upah minimum berdampak terhadap kemiskinan antara lain penelitian Sari (2021) yang menyatakan bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Senada dengan Hanifah (2021) yang menemukan bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap kemiskinan di provinsi Lamongan. Lebih lanjut pada penelitian Romi & Umiyati (2018) menunjukkan bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap kemiskinan di kota Jambi. Upah mempunyai dua aspek penting yaitu bagi karyawan dan bagi institusi (Sulistiawati, 2012). Para pekerja memandang upah sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, dan hal ini mempengaruhi upaya pekerja untuk meningkatkan pendapatannya, dan dalam dunia usaha menganggap upah sebagai sumber pendapatan untuk keperluan produksi. Meningkatkan efisiensi dilakukan dengan cara mengurangi biaya tenaga kerja. Tuntutan pekerja terhadap upah yang lebih tinggi dapat menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya berpengaruh pada terjadinya penurunan permintaan konsumen, dan pada akhirnya memaksa dunia usaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerjanya. Ada untuk mengurangi emisi. Efisien dan dapat bertahan di pasar. Jumlah orang ini menyebabkan bertambahnya orang pengangguran.

Upah mempunyai dua aspek penting, yaitu bagi karyawan dan bagi perusahaan (Sulistiawati, 2012). Pekerja memandang upah sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, dan hal ini mempengaruhi upaya pekerja untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan dunia usaha memandang upah sebagai sumber pendapatan untuk keperluan produksi dianggap sebagai sumber pendapatan. Hal tersebut karena pekerja yang lebih mementingkan upah riil yang mereka terima akan menginginkan upah nominal yang sepenuhnya mencerminkan tingkat inflasi yang diharapkan selama periode antara saat upah ditetapkan dan saat upah diumumkan. Perkiraan lain adalah bahwa pekerja akan menuntut kompensasi atas perkiraan inflasi, terlepas dari pengaruh tingkat lapangan kerja terhadap daya tawar upah. Mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Tuntutan pekerja terhadap upah yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan biaya produksi yang dapat menyebabkan kenaikan harga produk yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya permintaan konsumen yang pada akhirnya berdampak pada dunia usaha. Mereka ada untuk mengurangi emisi. Efisien dan dapat dipasarkan. Peningkatan jumlah penduduk ini akan menyebabkan peningkatan pengangguran.

2.2.4. PDRB

PDRB diartikan menjadi suatu total nilai tambah yang didapatkan dari berbagai semua unit usaha di dalam suatu daerah. PDRB dimaknai juga sebagai semua nilai yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diciptakan dalam segaluruh sektor ekonomi dalam daerah. BPS menjelaskan bahwa PDRB menjadi keseluruhan dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh sektor usaha dalam daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat atau syarat terpenting bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut dan kesejahteraan lebih lanjut. Pertumbuhan ekonomi tanpa

penambahan kesempatan kerja menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan tambahan (*ceteris paribus*), yang pada gilirannya menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya kemiskinan (Tambunan, 2003). Cuncolo mengatakan pendekatan pembangunan tradisional kemungkinan besar dimaknai sebagai pembangunan yang berfokus pada peningkatan PDB suatu negara bagian, kabupaten, atau kota. Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) suatu wilayah secara keseluruhan, namun juga dari seberapa luas distribusi pendapatan di berbagai lapisan masyarakat dan oleh siapa pendapatan tersebut didistribusikan kepada siapa. Dan ketika tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa mengubah pola makan dasar mereka ke makanan yang lebih sedikit dan termurah. Distribusi hasil pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDRB) yang adil dan merata berpotensi memberikan dampak terhadap pembangunan di semua sektor ketenagakerjaan dan mengurangi kemiskinan. Selain kemiskinan, kekurangan materi juga berdampak pada permasalahan sosial seperti kesejahteraan.

Menurut Kuncoro (2001) menjelaskan bahwa metode pembangunan klasik diartikan sebagai proses pengembangan PDRB suatu negara, wilayah, atau pada kota dengan penekanan yang lebih besar. Pada masa ini, PDRB dapat dihitung dengan dua metode, yaitu yang pertama dilihat dari sisi departemen atau suatu bidang usaha dan sisi pengguna. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan suatu kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi bagi masyarakatnya, sebagaimana ditentukan oleh kemajuan atau adaptasi teknologi dan kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznetz dalam Todara, 2004). Dalam sudut pandang ekonomi kesejahteraan Masyarakat demi mengurangi tingkat kemiskinan serta mengatasi tingkat kemiskinan dapat diukur dari pendapatan domestik bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor pengurang masalah kemiskinan pada suatu daerah. Pengukur dari tingkat pertumbuhan tersebut dapat

dilihat dari PDRB regional, yang menjadi acuan nilai bersih dari produk dan jasa akhir yang dapat diwujudkan dengan bermacam kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut (Hadi Sasana,2006).

Menurut Kakwani dan Silber (2008), menjalskan mengenai analisis kemiskinan yang berkaitan mengenai rendahnya distribusi kesejahteraan. Pada umumnya dalam mengukur permasalahan kemiskinan melibatkan pada 3 tahapan yaitu memilih indicator yang sesuai dengan kesejahteraan individunya, selanjtnya memilih garis kemiskinan yang dapat mengiidentifikasi untuk dijadikan objek, dan tahap yang terakhir yaitu memilih individu yang fungsional untuk mengumpulakn maisng-masing individu. Tingkat kesejahteraan memiliki korelasi juga terhadap kualitas hidup tetapi tidak memiliki korelasi yang kuat dengan pendapatan yang ada Terdapat konsep kapabilitas yang mengukur mengenai kebebasan dalam mencapai fungsi alternatif dimana fungsi tersebut pada prinsipnya dapat menentukan fungsi tertentu untuk keluar dari kemiskinan.

Ukuran pertumbuhan ekonomi merupakan cara penting untuk menentukan apakah suatu perekonomian sedang tumbuh atau tidak. Salah satu cara utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengevaluasi stabilitas relatifnya. Jika suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, dikatakan meningkat karena produksi barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran bagaimana kegiatan ekonomi dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ekonomi terutama berkaitan dengan produksi barang yang memanfaatkan faktor-faktor produksi, dan melibatkan transfer kompensasi atas unsur-unsur produksi masyarakat.. PDB menunjukkan produk dan jasa konklusif suatu perekonomian dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

Menurut Arsyad (1999:242) dalam (Alfianto et al 2019), untuk mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan cara membangun kualitas manusia, dan

meningkatkan aksesibilitas pelayanan dalam sektor pendidikan hingga kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009) yang menjelaskan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang menemukan bahwa adanya hubungan negative antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2008) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinamis telah banyak mengurangi tingkat kemiskinan. Hal tersebut terbukti Ketika Jumlah penduduk yang berjuang hidup dengan \$1 atau kurang per hari telah turun yang semula 900 juta pada tahun 1990 menjadi 600 juta. Penelitian lain yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008) yang mengkaji mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin mendapatkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin meskipun kecil.

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi prioritas karena pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4.444 memiliki arti bahwa peningkatan pendapatan per kapita sebesar 4.444. Sebab, pertumbuhan ekonomi memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi di banyak bidang. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan lebih banyak variasi barang ekonomi bagi warganya. Kemampuan ini tumbuh sebagai respons terhadap kemajuan teknologi dan penyesuaian institusional dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2010: 57).

2.2.5. IPM

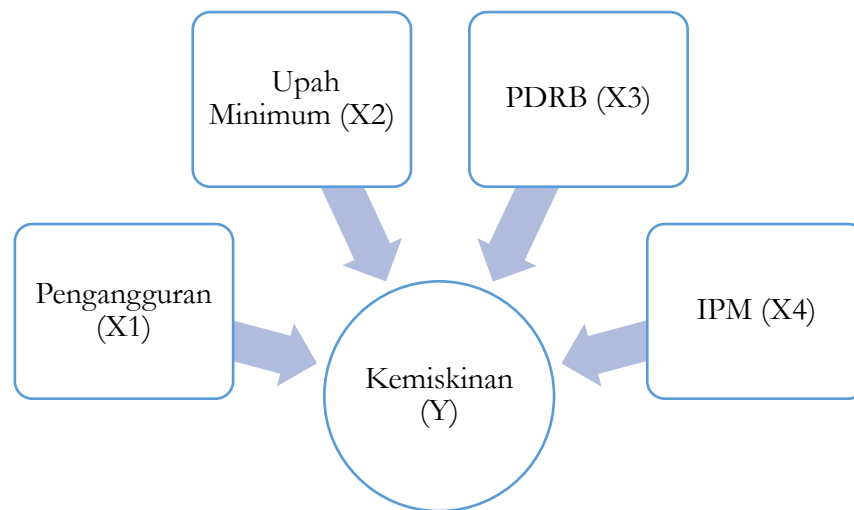
Untuk melihat suatu kualitas sumber daya manusia dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia menjelaskan mengenai Upaya dalam meningkatkan seseorang dalam laporan pada UNDP (United Nation Development Programme). Penduduk dipandang sebagai tujuan akhir dalam konsep tersebut, sementara usaha Pembangunan yang dinilai sebagai

wadah agar mencapai tujuan tersebut tercapai (Nurul Izzah, 2015). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi tolak ukur tersebut karena Ketika ketika suatu pendapatan yang rendah disebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, Hal ini merupakan pendapatan rendah yang berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin (Sukmaraga 2011). Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur yang dapat menjadi data yang digunakan oleh pemerintah dalam mengukur suatu pencapaian dengan menggunakan angka harapan hidup. Rendahnya suatu produktivitas akan berdampak bagi pendapatan, apabila suatu pendapatan mengalami penurunan akan berdampak juga pada tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sjafi'i dan Hidayati (2009) yang menjelaskan adanya kapasitas SDM yang berkualitas adalah syarat yang penting dalam keberlangsungan suatu pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan ukuran perbandingan angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup seluruh negara di dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan negara menjadi negara maju, berkembang, atau terbelakang, dan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk menilai sumber daya manusia digunakan Indeks Kualitas Hidup/Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia, penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah memiliki produktivitas tenaga kerja yang dapat dikatakan buruk. Produktivitas yang lebih rendah berarti pendapatan yang lebih rendah. Dengan demikian, pendapatan yang rendah mengakibatkan jumlah penduduk miskin yang banyak yaitu 4.444 jiwa. Hasil yang berhubungan dengan kualitas hidup diukur dengan HDI, yang merupakan ukuran pembangunan manusia. Data yang digunakan untuk menghitung IPM didasarkan pada informasi yang dapat menggambarkan keempat komponen tersebut. Sektor kesehatan didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai kehidupan yang panjang serta sehat.

Dalam sektor pendidikan, angka melek huruf, kehadiran di suatu sekolah, serta rata-rata lama belajar digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pendidikan. Daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan yang penting. Hal ini diperoleh dari rata-rata tingkat pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan.

2.3. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir

2.4. Hipotesis

- a. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022
- b. Diduga Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022
- c. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022
- d. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pengumpulan Data

Penelitian dengan judul Penaruh Pengangguran, Pendidikan, Upah Minimum, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan empat variabel X yaitu Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan IPM. Penelitian ini akan dilakukan pada kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan data yang akan dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel, data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Penelitian ini menggunakan pengumpulan metode sekunder, dimana metode sekunder merupakan pengumpulan data dengan data publikasi, artikel, jurnal ilmiah serta data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2022. Peneliti mengambil pada periode 2018-2022 karena pada jangka waktu lima tahun terakhir Jawa Tengah masih masuk peringkat 5 teratas dalam kategori provinsi miskin di Jawa Tengah.

3.2. Definisi Operasional Variable

Penelitian ini nantinya akan menggunakan kuantitatif dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Teknik sampel yang akan digunakan nantinya berupa data pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan Indeks Pembangunan manusia (IPM) di provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya rancangan penelitian ini berdasarkan atas empat variabel X yaitu pengangguran (X1), Upah Minimum (X2), PDRB (X3), dan IPM (X4), serta satu variabel Y yaitu kemiskinan (Y). Berikut merupakan penjelasan variable:

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan dapat memberikan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian. Selain berdampak bagi perekonomian dampak lain yang dirasakan yaitu kesejahteraan yang tidak maksimum. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah dengan data berupa presentase pada periode 2018-2022.

2. Pengangguran (X1)

Menurut teori pengangguran dapat dihitung dengan perbandingan para jumlah orang yang menganggur dengan Angkatan kerja, pengangguran juga mengacu pada orang yang tidak memiliki pekerjaan yang nyata. Data ini menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah terkait Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode 2018-2022.

3. Upah Minimum (X3)

Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena hal tersebut dapat berdampak juga bagi standar hidup yang layak. Upah juga merupakan sumber dari pendapatan, apabila pendapatan seseorang tetap saja sama bahkan tidak mengalami peningkatan sedangkan kebutuhan terus bertambah maka kesejahteraan juga akan mengalami penurunan yang berdampak pada Tingkat kemiskinan.

4. PDRB

Dalam sudut pandang ekonomi kesejahteraan Masyarakat diukur dari tinggi dan rendahnya pendapatan per kapita yang ada. Kesejahteraan Masyarakat secara regional dapat dilihat dengan PDRB. Pertumbuhan Ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan suatu pendapatan per kapita suatu negara.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam mengukur pencapaian dalam suatu Pembangunan manusia yang memfokuskan pada komponen dasar dari kualitas hidup dibutuhkan data Indeks Pembangunan manusia, dengan menggunakan pendekatan dimensi dasar yaitu salah satunya mengenai kehidupan yang layak bagi Masyarakat.

3.3. Metode Analisis

Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang bersifat panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Kemudian data tersebut akan diolah menggunakan program *EViews*. Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data-data statistik dari Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yang kemudian diambil dengan menggunakan data *time series* dan data *cross section* dari tahun 2018-2022. Peneliti menggunakan data panel untuk menjelaskan informasi mengenai unit serta waktu pada penelitian, Berikut persamaan yang akan diteliti:

Cross section :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e_1 = 1, 2, \dots, n$$

Keterangan :

β_0 = bilang konstanta

β_1 = koefisien regresi

e_1 = varaibel error

time serries :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e_1 = 1, 2, \dots, n$$

Keterangan :

t = jumlah periode

β_0 = bilang konstanta

β_1 = koefisien regresi

e_1 = varaibel error

Persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : Kemiskinan

β_0 : Bilangan konstanta

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien regresi

X_1 : Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Periode 2018-2022 (dalam persen)

X_2 : Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode
2018-2022 (dalam jutaan rupiah)

X_3 : PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2022
(dalam jutaan rupiah)

X_4 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Tengah (dalam persen)

3.4. Estimasi Model Regresi Data Panel

Penelitian dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan aplikasi *Eviews* yang bertujuan untuk mengetahui terkait tingkat signifikan pada

setiap variabel. Data panel juga merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data panel mempunyai perbedaan dengan data yang lain, dimana data tersebut terdiri atas beberapa waktu. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh regresi data panel yaitu dapat digunakan untuk menghitung heterogenitas individu secara eksplisit, dapat mengontrol heterogenitas yang mampu menjadikan data panel supaya dapat digunakan sebagai pengujian yang lebih kompleks, serta cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

3.4.1. Common Effect Model (CEM)

Common effect mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Dalam metode ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Adapun model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Observasi dari unit ke-1 selanjutnya diamati pada waktu ke-t (yaitu variabel dependen yang merupakan data panel).

X_{1it} : Variabel independen dari unit ke-1 yang selanjutnya akan diamati pada periode waktu ke-t yang diasumsikan X_{1it} memuat variabel konstanta.

X_{2it} : Variabel independen dari unit ke-2 yang selanjutnya akan diamati pada periode waktu ke-t yang diasumsikan X_{2it} memuat variabel konstanta.

e_{it} : Komponen error yang diasumsikan mempunyai harga mean 0 dan variasi

homoden dalam waktu dan independen dengan X_{it} .

3.4.2. Fixed Effect Model (FEM)

Metode fixed effect merupakan metode yang dapat mengetahui adanya perbedaan sedangkan slopenya tetap sama antar perusahaan. Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

3.4.3. Random Effect Model (REM)

Metode random effect di dalamnya akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Dalam hal ini, β_{0i} tidak lagi tetap (non stokastik) akan tetapi random sehingga sebagai berikut:

$$\beta_{0i} = \bar{\beta}_0 + \mu_i$$

Keterangan:

$\bar{\beta}_0$: Merupakan parameter tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi.

μ_i : Merupakan variabel gangguan bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu.

3.4.4. Tahapan Analisis Data

Dalam menguji data panel dibutuhkan teknik estimasi regresi data panel sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji chow atau sering disebut juga sebagai uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi common effect. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow yaitu:

H_0 : *Common Effect*

H_1 : *Fixed Effect*

Asumsi yang digunakan dalam uji chow adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{SSR_R - SSR_{U/q}}{SSR_R/(n - k)}$$

Keterangan:

$SSR_R - SSR_{U/q}$: *Sum of squared residuals metode effect dan teknik fixed effect.*

q : Jumlah restriksi metode common effect

n : Jumlah observasi

k : Jumlah parameter estimasi metode fixed effect

b. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari common effect metode OLS. Dalam uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan dalam uji LM yaitu:

H_0 : *Common Effect*

H_1 : *Random Effect*

Nilai statistik uji LM sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (T \bar{\hat{e}}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Keterangan:

n : Jumlah individu

T : Jumlah periode waktu

\hat{e} : Residual metode OLS

c. Uji Hausmant

Uji hausman digunakan untuk memilih apakah fixed effect atau random effect yang terbaik. Dalam uji hausman ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis dalam uji hausman yaitu:

H_0 : *Fixed Effect*

H_1 : *Random Effect*

Uji hausman akan mengikuti kriteria distribusi chi-squares dimana:

$$m = \hat{q} \text{var}(\hat{q})^{-1} \hat{q}$$

Dimana

$$\hat{q} = [\hat{\beta}_{OLS} - \hat{\beta}_{GLS}] \text{ dan } \text{var}(\hat{q}) = \text{var}(\hat{\beta}_{OLS}) - \text{var}(\hat{\beta}_{GLS})$$

3.4. Uji Asumsi Klasik

3.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Menurut Gujarati (2009), menyebutkan bahwa uji normalitas adalah suatu pengujian dimana jika probabilitasnya lebih besar daripada alpha 5 persen maka uji normalitas diterima. Pada model regresi, distribusi yang baik adalah datanya mendekati normal. Jika probabilitas yang dihasilkan lebih dari alpha 5% maka residual berdistribusi normal. Adapun jika nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari alpha 5% maka residualnya berdistribusi tidak normal.

3.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat digunakan untuk menguji apakah data tersebut mempunyai korelasi linear antara variabel bebas dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan tingginya variabel yang digunakan pada sampel. Hal tersebut berupa standar error yang akan naik dan menyebabkan tidak koefisien pada data yang diuji dan t-tabel bernilai lebih besar daripada t-hitung. Menurut Hasan (2010) Apabila terjadi gejala multikolinearitas maka mengatasi masalah multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan beberapa indikator yang digunakan untuk satu konsep yang sama atau pemecahan.

3.4.3. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain yang disebut homoskedasitas dan jika terdapat perbedaan

disebut heteroskedasitas. Pada pengujian heteroskedasitas, apabila tidak terdapat suatu pola tertentu serta tidak tersebar di atas atau di bawah angka nol dari sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedasitas.

3.4.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Dalam pengujian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada autokorelasi atau tidak dengan menggunakan uji *Runs Test*. Menurut Ghozali (2006), terdapat beberapa cara digunakan untuk melihat terjadi atau tidaknya suatu Autokorelasi.

3.5. Uji Statistik

3.5.1. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2006), uji statistic atau uji t memiliki tujuan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas yang dilakukan secara individual terhadap variabelnya terikat dengan variabel bebasnya lainnya adalah konstan. Hasil yang didapatkan dalam uji parsial adalah sebagai berikut:

1. Apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka secara signifikan variabel penjelas mempengaruhi variabel yang dijelaskan.
2. Apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka secara signifikan variabel penjelas tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan.

3.5.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengenali apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen apabila secara bersama-sama diujikan.

Dalam menentukan tingkat signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dilakukan dengan menggunakan uji F. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan antara F-tabel dan F-hitung. Ketika F-hitung lebih besar dari pada F-tabel dengan alpha 5% maka secara signifikan variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen.

3.5.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh model tersebut dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara nol sampai satu. Semakin tinggi nilai dari koefisien determinasi, maka variabel independen lebih dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila nilainya koefisiennya determinasi yang diberi symbol R^2 mendekatinya angkanya 1, maka variabelnya independennya makin mendekatinya hubungannya dengan variabelnya dependen (Gujarati, 2009).

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

Analisis data digunakan dalam penelitian sebagai cara untuk menganalisis data, analisis yang digunakan dengan cara mendeskripsikan hasil dari data data yang telah dikumpulkan. Data panel merupakan gabungan antara data time series dengan data cross section tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2022. Regresi yang dilakukan menggunakan *eviems* dengan menggunakan model effect seperti; CEM, FEM, dan REM, dari ketiga model tersebut merupakan suatu model yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui hasil nilai korelasi antara variable serta untuk mengetahui pengaruh antara variable independen dan variable dependen.

Observasi yang dilakukan didapatkan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode 5 tahun yaitu pada tahun 2018-2022. Observasi ini mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Nilai Maximum	Nilai minimum
Kemiskinan	10.86349	3.446262	17.83	3.98
Pengangguran	5.285657	1.962365	9.97	1.76
Upah Minimum	1917130	239330.1	2835021	6
PDRB	28134130	25752125	0.0000000153	6138623
IPM	72.60971	4.421859	84.35	65.67

Dari tabel, menjelaskan hasil dari perhitungan yang berasal dari data pada tahun 2018-2022. Didapatkan hasil perhitungan diantaranya Nilai *Mean* dan Standar Deviasi pada variable Kemiskinan sebesar 10.86349 dan 3.446262 sedangkan nilai tertinggi sebesar 17.83 Kabupaten Kabumen pada tahun 2021 dan nilai terendah sebesar 3.98 Kabupaten Semarang pada tahun 2019. Nilai *Mean* pada variable Pengangguran dan Standar deviasi sebesar 5.285657 dan 1.962365 nilai tertinggi sebesar 9.97 yaitu kabupaten Tegal dan nilai terendah sebesar 1.76 yaitu Kabupaten Pati pada tahun 2022. Nilai *Mean* dan Standar Deviasi pada variable Upah minimum sebesar 1917130 dengan Standar Deviasi 239330.1 sedangkan nilai tertinggi sebesar 2835021 yaitu Kabupaten Semarang dan nilai terendahnya sebesar 1490000 yaitu Kabupaten Banjarnegara. Nilai *Mean* dan Standar Deviasi pada variable PDRB 28134130 dengan Standar Deviasi 25752125 sedangkan nilai tertinggi sebesar 0.0000000153 dan nilai terendahnya sebesar 6138623). Nilai *Mean* dan Standar Deviasi pada variable IPM sebesar 72.60971 dengan Standar Deviasi 4.421859 sedangkan nilai tertinggi sebesar 84.35 dan nilai terendahnya sebesar 65.67.

4.2. Analisis Regresi Data Panel

4.2.1. Hasil Uji Fixed Effect

Pemilihan model merupakan uji yang dilakukan dengan suatu perbandingan yaitu melalui *Uji Chow* dan Uji hausman yang didapat dari hasil model CEM, FEM, dan REM agar mendapatkan hasil Terbaik. Regresi dengan data panel digunakan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi tujuan dalam suatu penelitian.

Tabel 4. 2. Hasil Uji FEM

Variable	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob.
C	54.37027	6.093741	8.922313	0.0000
Pengangguran	-0.003546	0.024056	-0.147402	0.883
Upah Minimum	0,00000323	0,000000402	8.023334	0.0000
PDRB	-0.00000003.34	0.0000000180	-1.860733	0.0649

IPM	-0.67116	0.093867	-7.150142	0.0000
Effect Specification				
Cross-section Fixed				
R-squared	0.992801	Mean dependen var		10.86349
Adjusted R-squared	0.99079	S.D dependen var		3.446262
S.E of regression	0.330737	Akaike info criterion		0.818594
Sum squared resid	14.87659	Schwarz criterio		1.52389
Log likelihood	-32.62702	Hannan-Quinn criter		1.104682
F-statistic	493.5828	Durbin-Watson stat		2.382758
Prob(F-statistic)	0.000000			

4.2.2. Hasil Uji Chow

Tabel 4. 3. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	281.03	-34.136	0.0000
Cross-section Chi Square	746.6025	34	0.0000

Ho : *Common effect* lebih baik

H1 : Fixed effect lebih baik

Didapatkan dari hasil estimasi menggunakan Eviews dapat disimpulkan bahwa *Prob* Cross section Chi-Square adalah $0,0000 < \alpha$ sebesar 5%. sehingga dapat disimpulkan bahwa uji hipotesisi menyimpulkan menolak Ho atau model yang

terpilih yaitu model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect*.

4.2.3. Uji Hausmant

Tabel 4. 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi Sq. Statistic	Chi.Sq d.f	Prob
Cross-section random	10.152238	4	0.0379

Ho : Random Effect lebih baik

H1 : Fixed Effect lebih baik

Didapatkan dari hasil estimasi menggunakan Eviews pada uji Hausmant dapat disimpulkan bahwa *Prob Cross section Chi-Square* adalah $0,0379 < \alpha$ sebesar 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji hipotesisi menyimpulkan menolak Ho atau model yang terpilih yaitu *Fixed Effect model* lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

Dari perbandingan kedua model ini telah menjawab pada rumusan masalah yang akan mengacu pada hasil regresi data panel menggunakan model yang telah dipilih yaitu *Fixed Effect Model*, Sehingga menghasilkan *Fixed Effect Model* sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan} = 54.37027 - 0.003546 \text{ Pengangguran} + 3.23\text{E-}06 \text{ Upah Minimum} - 3.34\text{E-}08 \text{ PDRB} - 0.671160 \text{ IPM}$$

4.3. Uji statistic

4.3.1. Koefisien Determinasi

Koefisien ini berfungsi sebagai pengukur kemampuan besarnya model dalam menjelaskan variasi dari variable terikat

Tabel 4. 5. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.992801
Adjusted R-squared	0.99079

Berdasarkan table. menjelaskan hasil dari koefisien determinasi, didapatkan hasil yaitu mengacu kepada hasil regresi menggunakan model *fixed effect*, dengan didapatkan nilai *R-Squared* sebesar 0,992801, yang artinya 99.28% dapat dijelaskan oleh variable Independen (Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan IPM) terhadap variable dependen (Tingkat Kemiskinan). Sementara 0,72% dijelaskan oleh variable lain diluar model.

4.3.2. UJI F

Uji F digunakan dalam penelitian untuk menganalisis tentang pengaruh antar variabel independent dengan variable dependen secara simultan.

Tabel 4. 6. Hasil Uji F

F-statistic	493.5828
Prob(F-statistic)	0.0000

Berdasarkan table diatas didapatkan bahwa hasil uji F pada model *Fixed Effect*, dengan melihat hasil nilai *prob (F-satistic)* sebesar $0.000000 < \alpha 5\%$. Artinya pada hasil uji tersebut didapatkan kesimpulan bahwa variable Independen (Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan IPM) berpengaruh terhadap Variable Dependen (Tingkat Kemiskinan).

4.3.3. Uji t

Tabel 4. 7. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob.
C	54.37027	6.093741	8.922313	0,0000
Pengangguran	-0.003546	0.024056	-0.147402	0.883
Upah Minimum	3.23E-06	4.02E-07	8.023334	0,0000
PDRB	-3.34E-08	1.80E-08	-1.860733	0.0649
IPM	-0.67116	0.093867	-7.150142	0,0000

Berdasarkan table diatas didapatkan bahwa hasil uji t pada model Fixed Effect sebagai acuan, dengan melihat hasil nilai prob pada variable Independen (Upah Minimum, PDRB dan IPM bahwa nilai prob < *alpha* 5%. Artinya pada hasil uji tersebut didapatkan kesimpulan bahwa variable Independen (Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan IPM) berpengaruh terhadap Vaariable Dependen (Kemiskinan).

4.4. Hasil dan Pembahasan

Analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi panel dan menggunakan model *Fixed Effect Model*. Hasil yang didapatkan variable Independen yang berjumlah empat diantaranya yaitu Pengangguran, Upah Minimum, PDRB, dan IPM memiliki pengaruh terhadap Tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Didapatkan hasil besar pengaruh pada uji statistic yaitu dengan koefisien determinasi sebesar 99.28%, yang artinya bahwa bearnya variable independent mampu menjelaskan variable kemiskinan.

1. Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Didapatkan hasil dari analisis pada variable pengangguran tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel tingkat pengangguran tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan tersebut sejalan dengan

penelitian (Suripto & Subayil, 2020) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan. Angka pengangguran tersebut sebagian besar merupakan angka pengangguran pendidikan, sehingga meskipun terdapat orang yang menganggur, namun tidak semuanya berada dalam kemiskinan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena banyak orang yang bekerja sukarela di pusat kota, dimana mereka mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keahliannya. Meskipun mereka menolak pekerjaan yang mereka rasa tidak sesuai dengan kemampuan mereka, mereka juga mempunyai cadangan lain yang dapat menyelesaikan masalah keuangan mereka. Angka pengangguran sendiri dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan berapa banyak pekerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran terpelajar adalah mereka yang pernah bekerja namun memutuskan untuk berhenti karena berbagai alasan, atau mereka yang terkena PHK dan mencari pekerjaan lagi (Jo, 2021). Terdapat juga beberapa pengangguran, sebagian berada di sektor informal dan sebagian lainnya memiliki usaha dan bekerja kurang dari 5 jam sehari. Dikutip dari Lincoln Arsyad (6 & Subayil, 2020): Salah jika kita menganggap orang yang tidak punya mata pencaharian itu miskin, tapi orang yang bekerja lebih dari 5 jam adalah jutawan

2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan

Didapatkan hasil dari analisis pada variable Upah Minimum yang memiliki koefisien sebesar 0.000000323, dimana nilai tersebut memiliki nilai positif serta menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan sebesar 1 juta rupiah akan mengurangi Tingkat Kemiskinan sebesar 3,23 persen dan sebaliknya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variable upah minimum memiliki pengaruh yang searah dengan variable dependen. dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dan hasil analisis didapatkan nilai prob sebesar $0,0000 < 5\%$ yang artinya bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan. Pada penelitian ini Upah berpengaruh positif yang artinya

kenaikan dari suatu upah banyak mengubah suatu taraf kehidupan yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

Terjadinya kenaikan upah dikarenakan adanya kenaikan tingkat produksi yang disebabkan oleh adanya inflasi serta terdapat suatu kenaikan dari pendapatan yang diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa yang terjadi. Apabila inflasi diturunkan dengan cara memperlambat tingkat pertumbuhan uang, yang terjadi yaitu para pekerja akan mengalami penurunan terhadap upah dan mengakibatkan Selain hal tersebut Perusahaan akan menaikkan harga produk. Pengaruh tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta Setya Ningrum (2017) dimana pada penelitian tersebut menjelaskan serta menunjukkan bahwa variable upah minimum positif dan signifikan.

3. Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Didapatkan hasil dari analisis pada variable PDRB bahwa PDRB tidak berpengaruh dan signifikan. PDRB dan tingkat kemiskinan merupakan dua indikator yang dipengaruhi oleh faktor yang sama. Terlebih lagi, meskipun terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, tidak ada jaminan bahwa PDRB dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Permasalahan struktural yang terjadi di berbagai daerah dapat mempengaruhi potensi dalam pengentasan kemiskinan, karena terdapat permasalahan struktural yang serius di beberapa daerah, seperti kurangnya infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pembangunan ekonomi. Disamping itu PDRB tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan karena tidak meratanya pertumbuhan di suatu daerah yang hanya memfokuskan pada peningkatan PDRB tidak memperhatikan terhadap pemerataan hasil Pembangunan.

4. Pengaruh IPM terhadap Tingkat Kemiskinan

Didapatkan hasil dari analisis pada variable IPM yang memiliki koefisien sebesar -0.67116, dimana nilai tersebut menunjukkan Ketika terjadi

kenaikan sebesar 1 persen akan mengurangi Tingkat Kemiskinan sebesar 0.67116 persen dan sebaliknya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis didapatkan nilai prob sebesar $0.0000 < 5\%$ yang artinya bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan.

Dengan meningkatnya suatu pendapatan pada Masyarakat maka akan memberikan kemudahan Masyarakat dalam mencukupi kebutuhan, dengan hal tersebut maka akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia akan menurunkan produktifitas Masyarakat sehingga berakibat pada pendapatan, sehingga apabila terjadi penurunan pada pendapatan akan meningkatkan tingkat kemiskinan.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan Pembahasan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, serta yang telah didukung oleh pendapat para ahli dan penelitian sebelumnya, dilakukan dengan analisis secara kuantitatif dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat pengangguran tidak memiliki dampak pada tingkat kemiskinan. Mayoritas pengangguran berkaitan dengan tingkat pendidikan, sehingga meskipun beberapa orang menganggur, tidak semuanya mengalami kemiskinan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak yang secara sukarela bekerja di pusat kota, mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka dan menolak pekerjaan yang dianggap tidak sesuai, dengan memiliki cadangan lain untuk mengatasi masalah keuangan.
2. Upah minimum berpengaruh positif, Kenaikan upah berdampak positif terhadap taraf hidup dan Tingkat kemiskinan. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan tingkat produksi yang terkait dengan inflasi. Namun, jika inflasi diperlambat dengan mengendalikan pertumbuhan uang, pekerja dapat mengalami penurunan upah, sementara perusahaan mungkin menaikkan harga produk.
3. PDRB dan tingkat kemiskinan merupakan dua indikator yang dipengaruhi oleh faktor yang sama. Meskipun demikian terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut tidak ada jaminan bahwa PDRB dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Permasalahan struktural yang terjadi di berbagai daerah dapat mempengaruhi potensi pengentasan kemiskinan, serta tidak meratanya hasil Pembangunan pada suatu daerah yang menyebabkan PDRB tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan pendapatan dalam masyarakat dapat mengurangi tingkat

kemiskinan, sementara IPM yang rendah dapat menurunkan produktivitas dan pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S, Anak Agung Istri Dea. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10 No 7, 2750-2778.
- Gunawan Romi, dkk. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan dan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5.
- Martini Dewi, dkk. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020). *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 5 No 2, 2599-3097.
- Martini Dewi, dkk (2022). Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020). *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 5.
- Millenia Putri Erliza dkk. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10 No 2, 106-114.
- Juergen J.E. Manoppo, dkk. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18 No 02.
- Islami Nadia dkk. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1, 939-948.

- Mahsunah, dkk. (2013). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya, 1*.
- Nana Putri Ani Ni Luh dkk (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia, 6 No 3, 481-497*.
- M. P C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Vol. 8). (Erlangga, Ed.) Jakarta: Erlangga.
- Mari'atus S Nia, dkk. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, upah minimum dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Yogyakarta tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 27*.
- P. Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Vol. 7). Jakarta: Erlangga
- Purboningtyas Indah dkk. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal saintika UNPAM : Jurnal Sains dan Matematika Unpam, 3 No 1*.
- Sebayang, R. &. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economica, 9 No 1*.
- Setyowati, dkk. (2022). Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah terhadap Kemiskinan di Karasidenan Surabaya Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 22*.
- Suliswanto, dkk (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8*.

- Suliswanto, dkk (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8 No 2.
- Suripto, L. S. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidik, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan MManusia Terhadap Kemiskinan di D.I.Yogyakarta Periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1 No 25, 2716-2443.
- Triana Sari Devie dkk (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah suatu Kajian berdasarkan Faktor Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 8, 37-50.
- Tri Utami Indah dkk.(2022). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Belanja Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat Kemiskinan pada Provinsi Mayoritas Muslim. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2, 145-160.
- Utami, dkk (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4.
- Wahyudi Dicky dkk. (2013). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 2 No 1, 1.

LAMPIRAN DATA

Lampiran 1. Data Penelitain

KABUPATEN/KOTA	TAHUN	KEMISKINAN	PENGANGGURAN	UPAH MINIMUM	PDRB	IPM
Kabupaten Cilacap	2018	11.25	7.49	1841209	98100568	69.56
Kabupaten Cilacap	2019	10.73	7.24	1989058	100327299	69.98
Kabupaten Cilacap	2020	11.46	9.1	2158327	90011584	69.95
Kabupaten Cilacap	2021	11.67	9.97	2228904	91944588	70.42
Kabupaten Cilacap	2022	11.02	5.57	2230731	96657548	70.99
Kabupaten Banyumas	2018	13.5	4.15	1589000	37414501	71.3
Kabupaten Banyumas	2019	12.53	4.17	1750000	39779321	71.96
Kabupaten Banyumas	2020	13.26	6	1900000	39121624	71.98
Kabupaten Banyumas	2021	13.66	6.05	1970000	40686808	72.44
Kabupaten Banyumas	2022	12.84	9.62	1983261	43069504	73.17
Kabupaten Purbalingga	2018	15.62	6.02	1655200	16458708	68.41
Kabupaten Purbalingga	2019	15.03	4.73	1788500	17387611	68.99
Kabupaten Purbalingga	2020	15.9	6.1	1940800	17182874	68.97
Kabupaten Purbalingga	2021	16.24	6.05	1988000	17731438	69.15
Kabupaten Purbalingga	2022	15.3	6.05	1996814	18690729	69.54
Kabupaten Banjarnegara	2018	15.46	3.99	1490000	14438150	66.54
Kabupaten Banjarnegara	2019	14.76	4.44	1610000	15246866	67.34
Kabupaten Banjarnegara	2020	15.64	5.86	1748000	15045885	67.45
Kabupaten Banjarnegara	2021	16.23	5.86	1805000	15536478	67.86
Kabupaten Banjarnegara	2022	15.2	5.23	1819835	16359106	68.61
Kabupaten Kebumen	2018	17.47	5.48	1573000	18778049	68.8
Kabupaten Kebumen	2019	16.82	4.69	1700000	19815063	69.6
Kabupaten Kebumen	2020	17.59	6.07	1845000	19527665	69.81
Kabupaten Kebumen	2021	17.83	6.03	1905400	20253059	70.05
Kabupaten Kebumen	2022	16.41	6.38	1911850	21425793	70.79
Kabupaten Purworejo	2018	11.67	4.43	1560000	12664976	71.87
Kabupaten Purworejo	2019	11.45	2.91	1686000	13353336	72.5

Kabupaten Purworejo	2020	11.78	4.04	1835000	13138294	72.68
Kabupaten Purworejo	2021	12.4	3.59	1895000	13573470	72.98
Kabupaten Purworejo	2022	11.53	5.92	1906781	14300557	73.6
Kabupaten Wonosobo	2018	17.58	3.5	1585000	13065842	67.81
Kabupaten Wonosobo	2019	16.63	3.43	1712500	13793040	68.27
Kabupaten Wonosobo	2020	17.36	5.37	1859000	13566176	68.22
Kabupaten Wonosobo	2021	17.67	5.26	1920000	14064765	68.43
Kabupaten Wonosobo	2022	16.17	4.45	1931285	14770504	68.89
Kabupaten Magelang	2018	11.23	2.89	1742000	22082796	69.11
Kabupaten Magelang	2019	10.67	3.07	1882000	23253154	69.87
Kabupaten Magelang	2020	11.27	4.27	2042200	22865152	69.87
Kabupaten Magelang	2021	11.91	5.03	2075000	23661713	70.12
Kabupaten Magelang	2022	11.09	5.01	2081807	24953205	70.85
Kabupaten Boyolali	2018	10.04	2.18	1651650	21406269	73.22
Kabupaten Boyolali	2019	9.53	3.09	1790000	22681098	73.8
Kabupaten Boyolali	2020	10.18	5.28	1942500	22409733	74.25
Kabupaten Boyolali	2021	10.62	5.09	2000000	23447366	74.4
Kabupaten Boyolali	2022	9.82	4.97	2010299	24931305	74.97
Kabupaten Klaten	2018	12.96	3.14	1661632	26360650	74.79
Kabupaten Klaten	2019	12.28	3.54	1795061	27805994	75.29
Kabupaten Klaten	2020	12.89	5.46	1947821	27480359	75.56
Kabupaten Klaten	2021	13.49	5.48	2011515	28531109	76.12
Kabupaten Klaten	2022	12.33	4.92	2015623	30214982	76.95
Kabupaten Sukoharjo	2018	7.41	2.72	1648000	25564065	76.07
Kabupaten Sukoharjo	2019	7.14	3.39	1783500	27076443	76.84
Kabupaten Sukoharjo	2020	7.68	6.93	1938000	26616503	76.98
Kabupaten Sukoharjo	2021	8.23	3.32	1986450	27634118	77.13
Kabupaten Sukoharjo	2022	7.61	4.31	1998153	29185359	77.94
Kabupaten Wonogiri	2018	10.75	2.28	1542000	19837022	69.37
Kabupaten Wonogiri	2019	10.25	2.55	1655000	20856209	69.98
Kabupaten Wonogiri	2020	10.86	4.27	1797000	20563144	70.25
Kabupaten Wonogiri	2021	11.55	2.43	1827000	21251165	70.49
Kabupaten Wonogiri	2022	10.99	2.47	1839043	22447731	71.04
Kabupaten Karanganyar	2018	10.01	2.28	1696000	25150278	75.54

Kabupaten Karanganyar	2019	9.55	3.12	1833000	26599744	75.89
Kabupaten Karanganyar	2020	10.28	5.96	1989000	26103228	75.86
Kabupaten Karanganyar	2021	10.68	5.89	2054040	27034108	75.99
Kabupaten Karanganyar	2022	9.85	1.95	2064313	28619990	76.58
Kabupaten Sragen	2018	13.12	4.83	1546493	25356460	72.96
Kabupaten Sragen	2019	12.79	3.32	1673500	26853059	73.43
Kabupaten Sragen	2020	13.38	4.75	1815915	26367261	73.95
Kabupaten Sragen	2021	13.83	4.76	1829500	27355146	74.08
Kabupaten Sragen	2022	12.94	5.7	1839429	28929809	74.65
Kabupaten Grobogan	2018	12.31	2.22	1560000	18688571	69.32
Kabupaten Grobogan	2019	11.77	3.54	1685500	19692631	69.86
Kabupaten Grobogan	2020	12.46	4.5	1830000	19383027	69.87
Kabupaten Grobogan	2021	12.74	4.38	1890000	20115534	70.41
Kabupaten Grobogan	2022	11.8	4.69	1894032	21318146	70.97
Kabupaten Blora	2018	11.9	3.3	1564000	17605216	67.95
Kabupaten Blora	2019	11.32	3.82	1690000	18318415	68.65
Kabupaten Blora	2020	11.96	4.89	1834000	17483887	68.84
Kabupaten Blora	2021	12.39	3.81	1894000	18126447	69.37
Kabupaten Blora	2022	11.53	4.4	1904196	18612419	69.95
Kabupaten Rembang	2018	15.41	2.83	1535000	12939682	69.46
Kabupaten Rembang	2019	14.95	3.6	1660000	13612335	70.15
Kabupaten Rembang	2020	15.6	4.83	1802000	13409631	70.02
Kabupaten Rembang	2021	15.8	3.67	1861000	13925516	70.43
Kabupaten Rembang	2022	14.65	3.7	1874322	14698844	71
Kabupaten Pati	2018	9.9	3.57	1585000	29189879	70.71
Kabupaten Pati	2019	9.46	3.64	1742000	30885379	71.35
Kabupaten Pati	2020	10.08	4.74	1891000	30527473	71.77
Kabupaten Pati	2021	10.21	4.6	1953000	31559079	72.28
Kabupaten Pati	2022	9.33	1.76	1968339	33312381	73.14
Kabupaten Kudus	2018	6.98	3.28	1892500	71048973	74.58
Kabupaten Kudus	2019	6.68	3.8	2044468	73241777	74.94
Kabupaten Kudus	2020	7.31	5.53	2218452	70964725	75
Kabupaten Kudus	2021	7.6	3.77	2290995	69872225	75.16
Kabupaten Kudus	2022	7.41	4.45	2293058	71433354	75.89
Kabupaten Jepara	2018	7	3.75	1739360	20170255	71.38

Kabupaten Jepara	2019	6.66	2.92	1879031	21384283	71.88
Kabupaten Jepara	2020	7.17	6.7	2040000	20973089	71.99
Kabupaten Jepara	2021	7.44	4.23	2107000	21944232	72.36
Kabupaten Jepara	2022	6.88	3.21	2108403	23249853	73.15
Kabupaten Demak	2018	12.54	7.03	2065490	17479877	71.26
Kabupaten Demak	2019	11.86	5.42	2240000	18417010	71.87
Kabupaten Demak	2020	12.54	7.31	2432000	18374562	72.22
Kabupaten Demak	2021	12.92	5.28	2511526	18856416	72.57
Kabupaten Demak	2022	12.09	4.1	2513005	19846431	73.36
Kabupaten Semarang	2018	7.29	2.25	1900000	33817679	73.61
Kabupaten Semarang	2019	7.04	2.54	2055000	35638962	74.14
Kabupaten Semarang	2020	7.51	4.57	2229881	34688037	74.1
Kabupaten Semarang	2021	7.82	5.02	2302798	35948862	74.24
Kabupaten Semarang	2022	7.27	6.11	2311254	37857919	74.67
Kabupaten Temanggung	2018	9.87	3.23	1557000	14483255	68.83
Kabupaten Temanggung	2019	9.42	2.98	1682027	15214059	69.56
Kabupaten Temanggung	2020	9.96	3.85	1825200	14890755	69.57
Kabupaten Temanggung	2021	10.17	2.62	1885000	15387930	69.88
Kabupaten Temanggung	2022	9.33	4.81	1887832	16187375	70.77
Kabupaten Kendal	2018	9.84	6.02	1929458	29245665	71.28
Kabupaten Kendal	2019	9.41	6.26	2084393	30916386	71.97
Kabupaten Kendal	2020	9.99	7.56	2261775	30449024	72.29
Kabupaten Kendal	2021	10.24	7.55	2335735	31632276	72.5
Kabupaten Kendal	2022	9.48	2.54	2340312	33431360	73.19
Kabupaten Batang	2018	8.69	4.2	1749900	14448626	67.86
Kabupaten Batang	2019	8.35	4.11	1900000	15226787	68.42
Kabupaten Batang	2020	9.13	6.92	2061700	15031084	68.65
Kabupaten Batang	2021	9.68	6.59	2129117	15764266	68.92
Kabupaten Batang	2022	8.98	7.34	2135535	16704987	69.45
Kabupaten Pekalongan	2018	10.06	4.36	1721638	15525051	68.97
Kabupaten Pekalongan	2019	9.71	4.35	1859885	16356351	69.71
Kabupaten Pekalongan	2020	10.19	6.97	2018161	16047512	69.63

Kabupaten Pekalongan	2021	10.57	4.28	2084155	16615066	70.11
Kabupaten Pekalongan	2022	9.67	6.64	2094646	17463416	70.81
Kabupaten Pemalang	2018	16.04	6.17	1588000	17265889	65.67
Kabupaten Pemalang	2019	15.41	6.45	1718000	18267200	66.32
Kabupaten Pemalang	2020	16.02	7.64	1865000	18155597	66.32
Kabupaten Pemalang	2021	16.56	6.71	1926000	18933195	66.56
Kabupaten Pemalang	2022	15.06	3.23	1940890	19895335	67.19
Kabupaten Tegal	2018	7.94	8.24	1617000	23552548	67.33
Kabupaten Tegal	2019	7.64	8.12	1747000	24861496	68.24
Kabupaten Tegal	2020	8.14	9.82	1896000	24492625	68.39
Kabupaten Tegal	2021	8.6	9.97	1958000	25401911	68.79
Kabupaten Tegal	2022	7.9	6.63	1968446	26707367	69.53
Kabupaten Brebes	2018	17.17	7.2	1542000	31060106	65.68
Kabupaten Brebes	2019	16.22	7.39	1665850	32847863	66.12
Kabupaten Brebes	2020	17.03	9.83	1807614	32693081	66.11
Kabupaten Brebes	2021	17.43	9.78	1866723	33533328	66.32
Kabupaten Brebes	2022	16.05	9.64	1885019	35414759	67.03
Kota Magelang	2018	7.87	4.78	1580000	6138623	78.31
Kota Magelang	2019	7.46	4.37	1707000	6470540	78.8
Kota Magelang	2020	7.58	8.59	1853000	6312054	78.99
Kota Magelang	2021	7.75	8.73	1914000	6513895	79.43
Kota Magelang	2022	7.1	9.48	1935913	6889453	80.39
Kota Surakarta	2018	9.08	4.35	1668700	33505901	81.46
Kota Surakarta	2019	8.7	4.16	1802700	35441108	81.86
Kota Surakarta	2020	9.03	7.92	1956200	34815965	82.21
Kota Surakarta	2021	9.4	7.85	2013810	36211248	82.62
Kota Surakarta	2022	8.84	6.71	2035720	38475988	83.08
Kota Salatiga	2018	4.84	4.23	1735930	9127858	82.41
Kota Salatiga	2019	4.76	4.33	1875325	9666446	83.12
Kota Salatiga	2020	4.94	7.44	2034915	9503711	83.14
Kota Salatiga	2021	5.14	7.26	2101457	9821996	83.6
Kota Salatiga	2022	4.73	5.83	2128523	10365314	84.35
Kota Semarang	2018	4.14	5.21	2310088	131266363	82.72
Kota Semarang	2019	3.98	4.5	2498588	140199517	83.19
Kota Semarang	2020	4.34	9.57	2715000	137601980	83.05

Kota Semarang	2021	4.56	9.54	2810025	144704572	83.55
Kota Semarang	2022	4.25	5.58	2835021	152999374	84.08
Kota Pekalongan	2018	6.75	6.08	1765179	7087916	74.24
Kota Pekalongan	2019	6.6	5.8	1906922	7477425	74.77
Kota Pekalongan	2020	7.17	7.02	2072000	7337834	74.98
Kota Pekalongan	2021	7.59	6.89	2139754	7601486	75.4
Kota Pekalongan	2022	7	7.6	2156213	8039460	75.9
Kota Tegal	2018	7.81	7.81	1630500	10594340	74.44
Kota Tegal	2019	7.47	8.08	1762000	11205783	74.93
Kota Tegal	2020	7.8	8.4	1925000	10949122	75.07
Kota Tegal	2021	8.12	8.25	1982750	11290269	75.52
Kota Tegal	2022	7.91	4.98	2005930	11873201	76.15

Lampiran 3 Common Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 11/10/23 Time: 00:53				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.53760	3.318642	14.92707	0.0000
PENGANGGURAN	0.119850	0.101957	1.175498	0.2414
UPAH_MINIMUM	-2.20E-06	1.04E-06	-2.114364	0.0359
PDRB	-2.04E-09	8.92E-09	-0.228727	0.8194
IPM	-0.482455	0.047635	-10.12813	0.0000
R-squared	0.487034	Mean dependent var	10.86349	
Adjusted R-squared	0.474965	S.D. dependent var	3.446262	
S.E. of regression	2.497138	Akaike info criterion	4.696323	
Sum squared resid	1060.069	Schwarz criterion	4.786746	
Log likelihood	-405.9283	Hannan-Quinn criter.	4.733001	
F-statistic	40.35157	Durbin-Watson stat	0.066846	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 2. Hasil Fixed Effect

Lampiran 4. Hasil Random Effect

Date: 11/10/23 Time: 00:57				
Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 11/10/23 Time: 00:58				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.97219	4.563548	10.95029	0.0000
PENGANGGURAN	0.006085	0.023279	0.261381	0.7941
UPAH_MINIMUM	2.90E-06	3.32E-07	8.728297	0.0000
PDRB	-2.75E-08	1.25E-08	-2.202980	0.0289
IPM	-0.604946	0.069791	-8.667979	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.475087	0.9825
Idiosyncratic random			0.330737	0.0175
Weighted Statistics				
R-squared	0.403970	Mean dependent var	0.648040	
Adjusted R-squared	0.389945	S.D. dependent var	0.431040	
S.E. of regression	0.336668	Sum squared resid	19.26872	
F-statistic	28.80508	Durbin-Watson stat	1.915670	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.407922	Mean dependent var	10.86349	
Sum squared resid	1223.558	Durbin-Watson stat	0.030168	

Lampiran 5. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: FE				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	281.030008	(34,136)	0.0000	
Cross-section Chi-square	746.602518	34	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/01/23 Time: 11:37				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.53760	3.318642	14.92707	0.0000
PENGANGGURAN	0.119850	0.101957	1.175498	0.2414
UPAH_MINIMUM	-2.20E-06	1.04E-06	-2.114364	0.0359
PDRB	-2.04E-09	8.92E-09	-0.228727	0.8194
IPM	-0.482455	0.047635	-10.12813	0.0000
R-squared	0.487034	Mean dependent var	10.86349	
Adjusted R-squared	0.474965	S.D. dependent var	3.446262	
S.E. of regression	2.497138	Akaike info criterion	4.696323	
Sum squared resid	1060.069	Schwarz criterion	4.786746	
Log likelihood	-405.9283	Hannan-Quinn criter.	4.733001	
F-statistic	40.35157	Durbin-Watson stat	0.066846	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: RE				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	10.152238	4	0.0379	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PENGANGGURAN	-0.003546	0.006085	0.000037	0.1123
UPAH_MINIMUM	0.000003	0.000003	0.000000	0.1479
PDRB	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.6438
IPM	-0.671160	-0.604946	0.003940	0.2915
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/01/23 Time: 11:40				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 175				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54.37027	6.093741	8.922313	0.0000
PENGANGGURAN	-0.003546	0.024056	-0.147402	0.8830
UPAH_MINIMUM	3.23E-06	4.02E-07	8.023334	0.0000
PDRB	-3.34E-08	1.80E-08	-1.860733	0.0649
IPM	-0.671160	0.093867	-7.150142	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.992801	Mean dependent var	10.86349	
Adjusted R-squared	0.990790	S.D. dependent var	3.446262	
S.E. of regression	0.330737	Akaike info criterion	0.818594	
Sum squared resid	14.87659	Schwarz criterion	1.523890	
Log likelihood	-32.62702	Hannan-Quinn criter.	1.104682	
F-statistic	493.5828	Durbin-Watson stat	2.382758	
Prob(F-statistic)	0.000000			